

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 1 Sei Lapan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan zonasi di SMA Negeri 1 Sei Lapan mulai dari perencanaan pendaftaran PPDB di SMA Negeri 1 Sei Lapan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama sekali kepala sekolah akan melakukan rapat MKKS yang berkaitan tentang pelaksanaan dan pembagian tugas kepanitiaan, lalu dilanjutkan dengan pemilihan kepanitiaan pelaksanaan dan pembuatan SK kepanitiaan. Setiap panitia mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing seperti membuat petunjuk teknis, melatih operator dalam penerapan PPDB, memantau, mengevaluasi, serta membuat laporan pelaksanaan. Selain itu, dalam pelaksanaannya juga semua sekolah yang berada dalam naungan Cabdis mempunyai kebijakan yang sama dalam melaksanakan PPDB ini. Kendala bagi calon peserta didik adalah sistem aplikasi yang tidak bisa dijangkau oleh banyak orang membuat calon peserta didik harus datang kesekolah untuk mendaftar.

- a. Perencanaan

Perencanaan pendaftaran PPDB di SMA Negeri 1 Sei Lapan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama sekali kepala sekolah akan melakukan rapat MKKS yang berkaitan tentang pelaksanaan dan pembagian tugas kepanitiaan, lalu dilanjutkan dengan pemilihan kepanitiaan pelaksanaan dan pembuatan SK kepanitiaan. Setelah itu baru sekolah akan menyediakan fasilitas seperti ruangan, komputer dan

jaringannya untuk membantu calon peserta didik dalam melakukan pendaftaran PPDB di SMA Negeri 1 Sei Lapan.

b. Pengorganisasian

Kepala sekolah akan memilih pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu dan mengetahui hal IT untuk menjadi pantian pelaksana PPDB ini karena pendaftaran sekarang dilakukan secara online. Setiap panitia mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing seperti membuat petunjuk teknis, melatih operator dalam penerapan PPDB, memantau, mengevaluasi, serta membuat laporan pelaksanaan.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan PPDB ini terbagi menjadi 3 tahap, pertama pendaftaran yang terdiri dari 2 tahap yaitu tahap I bagi calon peserta didik yang akan masuk melalui jalur afirmasi, perpindahan orang tua/wali, prestasi nilai rapor serta prestasi lomba akademik maupun non akademik, dan tahap II yaitu bagi calon peserta didik yang masuk dengan jalur zonasi. Kedua, yaitu pengumuman hasil seleksi, dan terakhir yaitu daftar ulang. Selain itu, dalam pelaksanaannya juga semua sekolah yang berada dalam naungan Cabdis mempunyai kebijakan yang sama dalam melaksanakan PPDB ini. Kendala bagi calon peserta didik adalah sistem aplikasi yang tidak bisa dijangkau oleh banyak orang membuat calon peserta didik harus datang kesekolah untuk mendaftar. Serta dalam pelaksanaannya tidak terdapat orang tua/wali murid yang protes dengan adanya sistem zonasi di SMA Negeri 1 Sei Lapan ini.

d. Evaluasi

Pengevaluasian yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Sei Lapan untuk mengatasi kendala seperti kurangnya pemahaman orang tua/wali tentang sistem zonasi ini adalah dengan menyediakan pusat informasi di sekolah.

2. Tingkat keberhasilan pada pengimplementasian kebijakan zonasi di SMA Negeri 1 Sei Lapan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

a. Komunikasi

Pelaksanaan PPDB dengan kebijakan zonasi di SMA Negeri 1 Sei Lelan sudah memenuhi dimensi komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksanaan. Terlihat dari koordinasi antar Dinas Pendidikan dengan sekolah sudah berjalan dengan baik, selain itu juga SMA Negeri 1 Sei Lelan juga sudah melakukan koordinasi internal yang baik, sehingga tidak adanya miskomunikasi antar sesama panitia pelaksana PPDB.

b. Sumber daya

Dalam penelitian ini staff/kepanitiaan di SMA Negeri 1 Sei Lelan sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku dengan sangat baik. Sehingga tidak ada orangtua/wali calon peserta didik yang bingung dengan cara pendaftaran PPDB sistem zonasi ini, karna sekolah telah membuka pusat informasi untuk para orag tua/wali calon peserta didik.

c. Disposisi

Semua pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 1 Sei Lelan menyetujui adanya sistem zonasi untuk PPDB ini karena dapat mengatasi kesenjangan mutu pendidikan yang ada dan menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit.

d. Sumber birokrasi

Di SMA Negeri 1 Sei Lelan dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi ini di bawahi langsung oleh bidang kesiswaan. Bidang kesiswaan berada dalam panitia PPDB sekaligus yang mengatasi segala urusan dalam penerimaan peserta didik baru, mulai dari pemberitahuan kepada masyarakat hingga daftar ulang.

3. Respon siswa terhadap sistem zonasi di SMA Negeri 1 Sei Lelan sangat baik. Mereka setuju dengan adanya sistem zonasi ini, dan mereka juga merasa terbantu dengan adanya sistem zonasi ini. Menurut mereka sistem zonasi ini sangat bermanfaat, jika segala sesuatu yang mencakup infrastruktur, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, baik guru maupun siswa, serta metode pembelajaran, dan lainnya semua sudah siap.

4. Sebelumnya karna ada pelabelan sekolah ini membuat sistem kelompok ditengah masyarakat. Dengan adanya sistem zonasi ini, maka tidak ada lagi predikat sekolah favorit, juga tidak ada lagi sekolah dengan sistem perankingan nilai SMP. Semua sekolah sudah mulai mengakomodasikan hak peserta didik untuk tertampung di sekolah terdekatnya, yang mengakibatkan turunnya biaya pengeluaran orang tua dan memudahkan pelaksanaan pengelolaan mutu sekolah. Bagi SMA Negeri 1 Sei Lapan, sistem zonasi ini membantu mereka untuk lebih berkembang karena mereka akan mendapatkan calon peserta didik yang beragam kualitas.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran bahwa :

1. Untuk pemerintah yang menjalankan system zonasi perlu adanya evaluasi agar dapat mengoptimalkan kebijakan system zonasi.
2. Diperlukannya sosialisasi secara periodik guna memberikan pengetahuan tentang kebijakan zonasi sebagai langkah pemerintah dalam mengurai penumpukan siswa yang dianggap favorit oleh beberapa pihak dengan fasilitas dan sumber daya yang baik.
3. Jika bisa system zonasi hanya dilakukan dengan sekali tahap saja agar tidak merugikan sekolah swasta yang berada di sekitaran sekolah negeri.